

GERAKAN KONTRA TAMBANG PASIR BESI DI DESA PASEBAN JEMBER

Oleh:

Khusna Amal

Fakultas Usuluddin dan Humanioran IAIN Jember

iza_jbr@yahoo.com

ABSTRACT

The result of study is expected to be utilized by both formal and non formal education and civil society organization to strengthen civic education or citizenship education which can build critical awareness of society of silent majority. By strengthening of the emerging social movements and changes, it is expected that people can become more critical in their political participation. Further implications, the public increasingly empowered in negotiating public interest, controlling power, and making the country or the government more civilized. Indeed, an important point to be underlined is that the study that have tried to synthesize or to discuss the liberals and also non-liberals approach which will provide neither empathetic knowledge nor critical knowledge in viewing of the relational relationship between civil society, social movements, and change. The result of the study took the civil society as crucial actor in building constructive opportunities for social changes. Furthermore, the study did not consider positivistic to civic role in democracy development since empirically they did not affect positively in democracy as well as non-liberal view. at the same time, the result of study an avoid the negative non-liberal view of civil society and demonstration changes concerning the destruction of mine symbols such as investor post, elite residents of pro-investor, and mining tools which is a form of the radical movement in opposing the mine. This movement was selected as a negotiating tool of powerless people in order to claim a succeed or struggle agenda. Different from the elite or educated middle classes who usually choose diplomacy and negotiation, powerless community tend to choose the mass radical movement. social movements in opposing the mine is successful to force investors to stop the project and also the district government to review the policy of mining exploration in accordance with criticism of citizens which belong to not pro-people.

Key words: Civil Society, Social Movements of Post-Reformation

PENDAHULUAN

Belakangan ini kita dikejutkan oleh aksi heroik kaum *bawo* (ibu-ibu) dari Rembang-Jawa Tengah dalam menolak industri semen (PT. Semen Indonesia) di kawasan pegunungan Kenden. Aksi kecil-kecilan kaum perempuan dari lapisan bawah itu, kemudian menjelma menjadi gerakan sosial (*social movement*) yang melibatkan dukungan sejumlah aktifis *Non Government Organizations (NGOs)* lintas daerah, setelah media ikut andil dalam *mem-blow up* kasus tersebut. Jadilah aksi lokal itu berkembang menjadi gerakan sosial yang menasional dengan daya tahan dan tekan lebih kuat. Hasilnya, gerakan sosial yang mendapatkan *support* dari elemen-elemen *civil society* lintas kelas dan wilayah itu (tidak sebatas lebih massif dan kohesif), berhasil menggagalkan rencana pemangku kepentingan (pemerintah dan pemodal) guna mendirikan industri pabrik semen.

Kasus hampir sama juga terjadi di kabupaten Jember, Jawa Timur. Pada periode 2000-an, sejumlah warga masyarakat di kecamatan Silo, menggelar aksi kolektif untuk melakukan penolakan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten dalam hal eksplorasi tambang emas dan mangan. Tujuh tahun kemudian, masyarakat desa Paseban, kecamatan Kencong, melakukan aksi serupa dalam menolak eksplorasi tambang biji pasir besi di sepanjang pesisir pantai Selatan, kawasan Paseban. Alhasil, gerakan sosial menolak tambang, baik di Silo maupun Paseban, yang mendapat *support* dari berbagai elemen *civil society*, juga berhasil menggagalkan keinginan penguasa dalam aliansinya dengan pemodal, untuk mengelola salah satu sumberdaya alam paling potensial, yakni tambang emas, mangan dan biji pasir besi.

Cerita kesuksesan gerakan sosial (sebagaimana kasus di Rembang-Jawa Tengah ataupun di Jember-Jawa Timur) seolah menjadi oase harapan dan optimisme bagi gerakan masyarakat sipil (*civil society*), dalam mengimbangi dominasi rezim ekonomi-politik yang senantiasa sukses mewujudkan kepentingannya dalam mengeksplorasi (dan mengeksploitasi) sumberdaya alam. Hampir sulit disanggah jika praktik pengelolaan sumberdaya alam strategis oleh negara dan lebih-lebih swasta (baca: pemodal), tidak mampu memberikan kemaslahatan, kesejahteraan, dan kemakmuran yang berkeadilan bagi semua elemen warga negara tanpa terkucuali. Ironisnya lagi,

dacrah-dacrah yang selama ini memiliki kekayaan sumberdaya alam melimpah seperti Aceh, Papua, dan Nusa Tenggara Barat (NTB), justru menjadi daerah yang kurang maju dan sejahtera. Sejauh ini, pengelolaan sumberdaya alam yang masih bercorak *developmentalism*¹, tanpa banyak mempertimbangkan aspirasi publik, hanya menciptakan berbagai problema sosial, budaya, dan ekonomi seperti kemiskinan, ketimpangan, kebodohan dan ketidakadilan².

Selain itu, kesuksesan gerakan sosial menantang kebijakan tambang yang tidak pro-rakyat, kian menegaskan peran penting masyarakat sipil (*civil society*), tidak terkecuali elemen kelas bawahnya (rakyat kecil, orang *awam*, *wong cilik*) sebagai aktor sejarah dalam mendesakkan perubahan. Mereka yang kerap dipandang sebagai kelompok tidak berpendidikan, sejatinya adalah aktor penting dalam gerakan perubahan. Mereka juga bukan sebatas pelaksana teknis dari ide-ide yang diproduksi oleh kalangan intelektual dan aktifis terdidik yang berasal dari kelas menengah. Buktinya, kerumunan dan keriuhan massa dalam skala massif yang mayoritas berasal dari segmen kelas bawah, menjadi unsur penting dalam gerakan sosial. Meski harus disadari pula jika keberhasilan gerakan sosial ini, tidak sebatas ditentukan oleh peran kelas bawah, melainkan juga melibatkan aktor-aktor lain seperti kalangan intelektual, aktifis, pers, dan elit agama yang berasal dari segmen kelas menengah.

Jadi, tampaknya warga masyarakat kelas bawah dalam gerakan sosial

¹ Pembangunan (*developmentalism*) adalah salah satu gagasan yang tertua dan terkuat dari semua gagasan Barat. Teori ini, selain dikembangkan dalam rangka membendung pengaruh dan semangat antikapitalisme bagi berjuta-juta rakyat di Dunia Ketiga, juga merupakan siasat baru untuk mengganti formasi sosial kolonialisme yang baru runtuh. Pembangunan, dengan demikian, merupakan kelanjutan langsung dari sejarah penjajahan selama 500 tahun. Diskursus *developmentalism* muncul tahun 1949, yakni saat Presiden Harry S. Truman mengumumkan kebijakan pemerintahnya, dan sejak itu ia telah resmi menjadi bahasa dan doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat. *Developmentalism* dilontarkan dalam era *perang dingin* untuk membendung sosialisme, sehingga ia merupakan bungkus baru dari kapitalisme (Lihat, Fakhri, 2002: 200; Schrijvers, 2000: 5-6; Hettne, 2001: 70; Sugiono, 1999: 83).

² Mansour Fakhri, *Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik*, Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar, 2002, hlm., 70; Susetjawan, Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial, dalam Moh. Mahfudz dkk. (ed.) *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, Yogyakarta: UII Press, 1999, hlm., 12.

dan keberhasilan yang dicapai, sebagaimana kasus aksi penolakan tambang di Jember, tidak bisa dipandang sebelah mata. Kenyataan ini sekaligus juga dapat menjungkir-balikkan pandangan *mainstream* yang memposisikan mereka sebagai kelompok *subaltern* yang lemah dan tidak berdaya sama sekali, terutama jika dikomparasikan dengan kelas menengah (*middle class*) terdidik³. Kendatipun mereka yang disebutkan belakangan memiliki keunggulan komparatif dalam hal penguasaan modal (terutama intelektual), namun basis massa dari setiap gerakan sosial, tetaplah terletak pada masyarakat akar rumput (*grass roots*), terutama petani dan kaum buruh. Tanpa partisipasi massa dalam jumlah besar yang *nota bene* berasal dari kelas bawah, maka gerakan sosial yang sering digambarkan berasal dari ide-ide kelas menengah⁴, tidak akan memiliki daya dobrak yang kuat.

Sebenarnya, sudah terdapat sejumlah kajian yang menempatkan masyarakat kelas bawah sebagai aktor historis yang berperan penting dalam menciptakan gerakan sosial. James Scott dan E.J. Wolf merupakan sedikit contoh dari ilmuwan sosial yang berkepentingan untuk mengangkat peran kelas bawah sebagai aktor historis dalam gerakan perubahan. Menurut mereka orang-orang desa yang diposisikan sebagai rakyat jelata (*ndeso*, kurang terdidik, *kaumel*) itu, sejatinya adalah aktor-aktor sosial (*social agencies*) yang tidak sepenuhnya tidak berdaya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mereka selalu memiliki kemampuan dalam menciptakan siasat untuk tidak selalu tunduk mengikuti kemauan kelas dominan (baca: tuan tanah). Melalui aksi kecil-kecilan yang dilakukannya seperti *rasan-rasan*, *grundelan*, dan pencurian, membuktikan kekuatan mereka dalam mempertahankan

³ Elemen yang dianggap paling progresif dalam *civil society* adalah kelas menengah, karena merekalah yang paling mungkin mengembangkan aspirasi-aspirasi dan nilai-nilai liberal-demokratis, dan oleh karena itu, merupakan agen perubahan dan demokratisasi yang paling mumpuni. Kepentingan mereka pun sering diidentikkan dengan kepentingan-kepentingan *civil society* secara umum. Vedi R. Hadiz, *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, Jakarta: LP3ES, 2005, hal., 32.

⁴ Sebagaimana dikemukakan Kuntowijoyo bahwa radikalisasi petani masa lalu dapat berasal dari elit kota maupun elit desa sendiri. Ada banyak kasus yang menunjukkan pemberontakan petani yang dipimpin oleh para bangsawan, dan lebih banyak lagi kasus pemberontakan petani yang dipimpin oleh ulama pedesaan atau guru. Kuntowijoyo, *Radikalisasi Petani*, Yogyakarta: Benteng, 2002, hlm., 6.

kelangsungan hidup, melindungi tradisi, dan memperjuangkan hak atas tanah, dari eksploitasi kelas dominan. Setidaknya, aneka gangguan yang mereka ciptakan turut mengusik dan membatasi keleluasaan kelas dominan dalam memaksakan hegemoninya⁵.

Jika dicermati, gerakan-gerakan sosial kaum awam itu mengambil bentuk dengan corak kepentingannya yang beragam. Sampai periode 1980-an, gerakan sosial banyak berkaitan dengan kepentingan yang bersifat moral dan ekonomi (materialistik). Sedangkan, perkembangan terkini tidak lagi sebatas berkaitan dengan soal klaim kepemilikan (tanah dan berbagai asset produksi ekonomi lain) dengan basis ideologi *milénarisme*, tetapi telah bergerak jauh ke depan. Nalar gerakan mereka semakin rasional dengan agenda perjuangan yang semakin plural, jamak dan majemuk. Gerakan sosial yang disebut belakangan ini telah melangkah ke jalan baru (baca: *new social movements*) dengan mulai mempertanyakan hak-hak publik, ekologi, kebebasan individu, keadilan sosial, kebutuhan untuk melakukan redefinisi dan transformasi nilai-nilai sosial, artikulasi terhadap permasalahan yang terkait dengan warisan budaya, simbol dan sejarah, dan isu-isu non-materialistik lainnya⁶.

Selain itu, pergeseran gerakan sosial tidak sebatas menyangkut isu yang diperjuangkan, namun juga berkaitan dengan latar belakang aktor. Jika sebelumnya gerakan sosial yang dilakukan orang awam bersifat sektoral, kini perjuangan mereka meluas dan bahkan melintasi batas. Para aktor atau partisipan tidak lagi didukung oleh batas-batas kelas, namun dapat berasal dari berbagai latar pekerjaan, etnis, jenis kelamin, organisasi, keagamaan,

⁵ Menurut Hery Santoso, hegemoni merupakan nama yang oleh Gramsci diberikan kepada proses dominasi ideologi kelas-kelas yang berkuasa, yang pada akhirnya membuahkan persetujuan dari kelas-kelas yang dikuasai. Akan tetapi menurut Perry Anderson — ia mengacu pada kasus Bolshevik — pengertian hegemoni sebenarnya lebih mengacu pada kontrol politik, yang belum tentu bisa membuahkan persetujuan. Hery Santoso, *Perlawanan di Simpang Jalan, Kontes Harian di Desa-desa Sekitar Hutan*, Yogyakarta: Damar, 2004, hlm., 301. Lebih lanjut baca pula Antonio Gramsci, *Selections from The Prison Notebook*, editor dan terjemahan Quinten Hoare dan Geoffrey Nowell Smith, London: Lawrence and Wishart, 1971, dan Perry Anderson, *The Antinomies of Antonio Gramsci*, dalam *New Left Review* 100, 1976; James C. Scott, 1976, *The Moral Economy of Peasant*, New Haven: Yale University Press.

⁶ Rajendra Singh, *Social Movements, Old and New: A Post Modernist Critique*, New Delhi & London: Sage Publications, 2001, hal., 301.

dan lain-lain. Kendatipun para aktor itu berasal dari 'kelas sosial' yang sama, dalam kenyataannya mereka bukanlah kelompok sosial yang serba homogen dalam berbagai hal. Bagaimanapun para petani dan kaum buruh yang terlibat dalam gerakan memiliki latar sosial, ekonomi (pendapatan), pendidikan, keinginan dan kepentingan yang tidak persis sama.

Penelitian ini sendiri memposisikan diri dalam garis kajian-kajian terdahulu yang mengangkat muslim kelas bawah sebagai aktor dari sebuah gerakan sosial di pedesaan. Sebagai pembeda, penelitian ini tidak mendalami bentuk-bentuk perlawanan keseharian (Scott dan Hery Santoso), gerakan radikal berbasis ideologi (Kuntowijoyo dan Satono Kartodirdjo), ataupun strategi adaptasi dan *survival* kaum petani (Geertz, Breman dan Toni Beck), tetapi lebih mendalami pengalaman muslim kelas bawah dalam melakukan aksi kolektif menolak tambang. Kendatipun mereka baru sekali melakukan gerakan sosial dalam skala massif, namun pengalaman mereka tetap penting diperhitungkan. Bagaimanapun, kasus tambang akan memiliki dampak jangka panjang bagi kehidupan mereka. Sebab, para pemangku kepentingan (pemerintah dan pemodal), akan tetap menjadikan tambang di Paseban sebagai bagian dari rencana pembangunan yang suatu saat, hampir pasti, diwujudkan.

Satu hal yang dipertimbangkan dalam penelitian ini ialah bahwa mereka yang diidentifikasi sebagai muslim yang berada di strata bawah (baca: kelas bawah) itu, bukanlah entitas sosial yang bersifat homogen. Basis sosial, ekonomi, aspirasi politik, identitas keagamaan, hasrat dan kepentingan mereka dalam gerakan sosial merupakan elemen-elemen yang turut menciptakan lapisan-lapisan pada kalangan kelas bawah. Karena itu, ikhtiar untuk memahami gerakan sosial dengan menempatkan kelas bawah sebagai aktornya, tidak bisa mengabaikan begitu saja fakta-fakta ini. Dalam aksi gerakan sosial mereka memang mampu membangun kesatu-paduan, namun dalam kohesifitas mereka terdapat pula heterogenitas yang jika diselamai lebih mendalam, saling bersaing dan bahkan berkontradiksi.

GERAKAN SOSIAL KONTRA TAMBANG

Sejak ada isu penambangan pasir besi oleh investor di desa Paseban, mulai muncul riak-riak pergolakan di tengah-tengah warga masyarakat.

Gerakan Kontra Tambang Pasir Besi di Desa Paseban Jember

Warga yang sehari-harinya bekerja untuk mencari nafkah, (petani pergi ke sawah, nelayan pergi melaut, para ibu rumah tangga sibuk dengan urusan rumah tangga), dengan rutin, tenang, dan damai, lantas berubah ketika penambangan pasir besi mulai bergulir. Kehidupan sosial warga mulai terusik dengan isu tersebut, meskipun mereka tetap bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Akan tetapi, warga merasa tidak nyaman dengan rencana penambangan tersebut.

Pada tahun 2009, pemerintah kabupaten Jember melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) mengeluarkan surat Nomor: 641.31/00/438.314/2009 perihal izin eksploitasi kepada PT. Agrika Dwi Sejahtera untuk menambang kandungan pasir besi seluas 490 Ha di sepanjang bibir pantai Paseban dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun. Aktivitas penambangan pun lantas siap dimulai di mana alat-alat berat sudah siap dibawa ke lokasi untuk mengeruk gundukan pasir besi. Rencana kegiatan pengerukan pun lantas mengundang reaksi dari warga yang memang tidak sepakat dengan kebijakan tambang. Bukan sebatas alasan ekonomi, warga berargumen jika keberadaan gumpuk pasir besi itu menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat. Mengeksploitasi gumpuk pasir besi berarti mengeksploitasi kehidupan warga masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh seorang warga bahwa:

“kenapa penambangan di Paseban mendapat reaksi dari masyarakat, karena ada aksi dari luar daerah, baik penambang atau siapapun yang tidak dikehendaki sama masyarakat Paseban. Dalam hal apapun bukan di sini terkait itu benar dia penambang atau bukan penambang yang penting dia melakukan aksi di wilayah Paseban yang tidak didahului oleh koordinasi”.

Dalam perspektif sosiologis, reaksi yang muncul dari masyarakat Paseban itu menjadi bukti adanya eksistensi kehidupan sosial di mana pun berada, jika ada aksi yang datang baik dari dalam maupun dari luar, pasti akan memunculkan reaksi. Dengan demikian, reaksi masyarakat merupakan hal yang sangat wajar terjadi. Ada berbagai macam reaksi yang muncul dengan adanya rencana penambangan sebelum kemudian masyarakat menolak penambangan tersebut. Peneliti membagi kondisi masyarakat desa Paseban ke dalam dua fase yaitu fase pra izin penambangan dan fase pasca

izin penambangan. Kedua fase tersebut merupakan satu kesatuan dinamika yang terjadi terkait reaksi masyarakat desa terhadap penambangan.

Munculnya Embrio Gerakan

Sebelum keluarnya surat izin eksploitasi, masyarakat disibukkan dengan isu mendukung dan menolak penambangan. Pihak yang mendukung penambangan menuntut deselerasi penambangan, sedangkan pihak yang menolak penambangan berusaha untuk mencegah berbagai aktifitas penambangan agar berhenti secara total segala macam yang terkait dengan penambangan. Pada saat itulah terlihat munculnya embrio gerakan penolakan tambang.

Aktifitas pengambilan sampel sebagai bagian dari eksplorasi mendapat respon dari masyarakat. Masyarakat terbagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, masyarakat mendukung penambangan; kedua, masyarakat menolak penambangan; dan ketiga, masyarakat mengambang, yaitu orang-orang yang belum mengambil sikap. Pada rentang waktu dari keluarnya izin eksploitasi sampai keluarnya izin eksploitasi merupakan masa konsolidasi antara tiga bagian masyarakat tersebut sebelum kemudian menjadi kekuatan besar di mana mayoritas masyarakat Paseban bersama-sama menolak penambangan.

Pihak yang meyakini dengan adanya penambangan mengumpulkan diri dalam satu kelompok untuk mendukung usaha pemerintah agar segera merealisasikan penambangan. Pihak tersebut mengelompokkan diri dalam sebuah wadah yang disebut, "Aliansi Masyarakat Pro Tambang". Adapun yang menjadi semangat gerakannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi pasir besi. Kelompok tersebut melakukan beberapa cara di antaranya, pertama mengajak berbagai elemen masyarakat tujuannya untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat supaya bisa mempermudah dan mempercepat pemerintah dalam merealisasikan penambangan karena dalam prinsip otonomi daerah, dukungan dari masyarakat merupakan salah satu syarat mutlak dalam melaksanakan pembangunan daerah. Kedua, melakukan demonstrasi mendesak pemerintah untuk segera merealisasikan penambangan karena lebih cepat penambangan dilakukan maka akan lebih cepat pula dalam mewujudkan harapan

masyarakat yang lebih mapan dan sejahtera.

Munculnya desakan-desakan dan demonstrasi dari masyarakat pendukung penambangan memicu masyarakat lain yang tidak merasa nyaman dengan aktifitas eksplorasi yang dilakukan oleh pihak investor. Reaksi tersebut muncul karena aktifitas eksplorasi dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat Paseban. Investor melakukan eksplorasi tanpa terlebih dahulu membicarakannya dengan masyarakat desa hal ini menyebabkan munculnya kecurigaan-kecurigaan yang kemudian menjadi sebuah kelompok kecil yang bergerak untuk menolak rencana penambangan. Kelompok ini yang pertama kali bersinggungan dengan kelompok atau aliansi masyarakat pendukung penambangan atau bisa disebut masyarakat penolak penambangan. Kelompok kecil tersebut dipelopori oleh orang-orang berpengaruh di desa tersebut di antaranya adalah Gatoto, Lasidi, Bambang, Sutarno. Kelompok kecil tersebut beranggapan bahwa aktifitas yang dilakukan oleh investor merupakan aktifitas yang merugikan masyarakat karena dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang penggerak gerakan tersebut bahwa:

“di awal kejadian itu, berawal dari pemerintah dan investor untuk melaksanakan proyek penambangan pasir besi itu yang tidak pernah sama sekali mengadakan sosialisasi ditingkat bawah atau desa dan pernah diadakan sosialisasi waktu itu hanya dikecamatan dan ternyata memang disana dibuat seperti itu, dibuat permainan atau skenario semacam itu sehingga ada kepentingan beberapa orang. Ya mungkin berfikir bukan untuk kepentingan masyarakatnya memikirkan kepentingan pribadi. Sehingga itu disembunyikan dari masyarakat dan itu sudah dibuat semacam apa saja segmen kepentingan perorangan atau golongan. Jadi dia gak gak untuk kepentingan rakyat, memperjuangkan hak rakyat, tidak. Makanya itu tidak sampai terjadi sosialisasi ditingkat desa, gak pernah terjadi”.

Masyarakat yang menolak penambangan melakukan berbagai usaha untuk meyakinkan masyarakat lain di antaranya pertama, mengajak masyarakat yang tidak peduli dengan cara *‘nyangkruk’* membicarakan kegagalan aktifitas yang dilakukan oleh pihak investor tujuannya agar masyarakat peduli mengenai kewajibannya dalam pembangunan daerah di mana keter-

libatan masyarakat merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi. Kedua, membawa isu penambangan ke ranah yang lebih luas di mana masyarakat penolak penambangan ini membuka diri terhadap partisipasi dari luar. Tujuannya untuk membentuk kekuatan besar karena sedikit demi sedikit masyarakat menyadari bahwa melakukan penolakan penambangan merupakan gerakan melawan pemerintah sehingga membutuhkan kekuatan besar. Usaha-usah yang dilakukan tidak sia-sia, isu penolakan penambangan yang diperjuangkan menarik perhatian berbagai di antaranya organisasi massa Islam yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan organisasi non-pemerintah yang konsen terhadap lingkungan seperti Antam (Anti Tambang), Mina Bahari, dan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) ikut turut serta menyuarakan penolakan terhadap penambangan. Selain itu juga aktivis mahasiswa ikut terpenggil untuk ikut ambil bagian dalam memperjuangkan penolakan penambangan yang dinilai ada kejanggalan dalam proses pengambilan keputusan dilakukan penambangan, seperti pendapat seorang aktivis mahasiswa bahwa:

“ya kalau prosedurnya sudah banyak yang kacau dari awal. Pertama persoalan surat izin, surat izin itu kan harus mengintegrasikan dengan masyarakat sekitar karena apapun dampak yang akan di yang kena langsung dampak pertambangan itu adalah masyarakat. Jadi menjadi wacana ketika masyarakat merasa mereka itu tidak dilibatkan dan tidak dikasih tahu. Tapi sebenarnya poin yang menjadi fatal itu sebenarnya bukan itu karena memang kondisinya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan penambangan. Kalau prosedurnya itu banyak yang kacau sangat banyak yang kacau, mulai dari surat izin, sosialisasi mengintegrasikan dengan masyarakat banyak yang fatal mulai dari produk hukum, maka sampai sekarang itu juga, tidak satu dua PT menginginkan pasir besi yang ada di Paseban. Uh banyak sekali”.

Kejanggalan yang terjadi dalam proses dikeluarkannya izin eksploitasi tampaknya mendapatkan respons yang positif dari kelompok ketiga yaitu kelompok mengambang. Alasan tersebut cukup rasional untuk mempengaruhi kelompok mengambang.

Perbedaan sikap yang muncul sebagai akibat kesalahan struktur (keputusan pemerintah mengambil kebijakan penambangan tanpa melibatkan

masyarakat sebagai bagian dari struktur) yang berada di luar kekuasaan masyarakat atau *structural condusimess* menjadi pemicu terjadinya kekacauan di dalam masyarakat kekacauan ini dalam konsep Smelser disebut sebagai *structural strain*⁷. Pada periode ini, telah terjadi tarik ulur antara kelompok bagian yang memiliki perbedaan sikap sebagai geliat awal embrio gerakan menolak penambangan. Embrio gerakan menolak penambangan dipicu oleh kekecewaan terhadap pemerintah dan investor karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan penambangan. Embrio gerakan menolak penambangan terdiri dari beberapa masyarakat Paseban, yaitu Bambang, Lasidi, Gatoto, dan Sutarno.

Munculnya tiga bagian masyarakat dalam merespon rencana penambangan menjadi cikal bakal kelahiran gerakan sosial untuk menolak penambangan. Ciri-ciri yang paling menonjol dalam periode ini adalah terjadinya saling pengaruh-mempengaruhi antar-kelompok masyarakat tersebut. Interaksi antar-kelompok masyarakat untuk saling memengaruhi, seolah menjadi konsolidasi internal sebelum kemudian dipersatukan ke dalam gerakan penolakan tambang. Konsolidasi yang terjadi dilakukan dengan cara diskusi-diskusi '*cangkrokan*', bahkan dalam bentuk *guyonan*. Cara-cara yang dilakukan secara umum bersifat komunikatif di mana melalui media-media komunikatif tersebut diharapkan muncul kesamaan persepsi, pandangan dan pemahaman terhadap penambangan pasir besi. Dalam konsep teori strukturasi Giddens, pada tahap pra dikeluarkan izin tambang ini, masyarakat berada dalam kesadaran diskursif⁸. Perbedaan respon yang terjadi dalam masyarakat dituangkan dalam bentuk bahasa-bahasa untuk saling mempengaruhi antar bagian masyarakat sehingga terjadi diskusi-diskusi antar mereka sebelum kemudian terbangun satu kesatuan masyarakat menolak penambangan.

Respon Masyarakat Paseban Pasca Izin Penambangan

Pasca dikeluarkannya surat izin eksploitasi (penambangan) terhitung sejak dikeluarkan pada bulan februari tahun 2009. Periode ini sebagai se-

⁷ Neil J. Smelser, *Theory of Collective Behavior*, New York: The Free Press, 1962, hal., 15.

⁸ Anthony Giddens, *Teori Strukturasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal., 69.

rangkaian keberlanjutan dari reaksi masyarakat terhadap rencana penambangan. Seperti peneliti jelaskan diatas, respon yang terjadi di masyarakat terbagi menjadi tiga yaitu, pendukung penambangan, penolak penambangan dan kelompok mengambang. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut mengalami dinamika yang mengakibatkan terjadinya perubahan kekuatan dalam merespon penambangan. Untuk itu peneliti perlu menjelaskan lebih lanjut sebagai berikut .

Kecurigaan Masyarakat Meningkat

Pasca dikeluarkan surat izin eksplorasi dari Pemerintah Kabupaten Jember kepada PT. Agtika Dwi Sejahtera menandakan secara positif gumuk pasir besi berhak ditambang oleh investor bersangkutan. Proses keluarnya izin eksploitasi terhitung cepat, sekitar 3 (tiga) bulan, terhitung sejak perizinan eksplorasi (November 2008) sampai dikeluarkannya izin eksplorasi (Pebruari 2009). Kebijakan tambang sendiri juga dinilai kurang aspiratif mengingat, pertama, setidaknya antara pemerintah, calon investor (PT. Agtika Dwi Sejahtera) dan perwakilan Desa melakukan rapat dua kali yaitu sebelum dikeluarkan surat izin eksplorasi dan sebelum dikeluarkan surat izin eksplorasi kepada investor. Rapat pertama dilakukan untuk memberitahu rencana pemerintah terkait potensi tambang pasir besi di desa Paseban dan belum ada keputusan dalam hal penambangan. Tidak lama setelah rapat tersebut, izin eksplorasi dikeluarkan kepada komisaris PT. Agtika Dwi Sejahtera dan dimanfaatkan untuk mengambil sampel terakhir sebelum penambangan benar-benar dilakukan. Rapat kedua dilakukan setelah mengambil sampel, rapat tersebut dilakukan dengan tujuan mensosialisasikan rencana penambangan, memperkenalkan calon investor dan termasuk di dalamnya membicarakan tata kelola penambangan dan rapat tersebut belum menghasilkan keputusan bulat akan dilakukan penambangan. Tidak lama setelah rapat tersebut, izin eksploitasi dikeluarkan kepada investor. Kedua, proses pengambilan keputusannya melibatkan tiga pihak elit yaitu antara Pemerintah Kabupaten, investor dan perwakilan desa (perangkat desa dan BPD) tanpa ada kebulatan pendapat di dalamnya. Ketiga, pengambilan keputusan untuk mengeluarkan izin eksplorasi dan eksploitasi tidak disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari subjek pembangunan.

Proses keluarnya izin eksplorasi dan eksploitasi yang kurang optimal mengakibatkan munculnya kecurigaan dalam masyarakat semakin meningkat. Akumulasi kecurigaan masyarakat tidak bisa dibendung dan menjadi bola api sehingga gejala penolakan penambangan semakin menguat. Kuatnya gejala penolakan tambang membuat hubungan antara rakyat dengan pemangku kekuasaan dan investor menjadi tegang, seperti yang digambarkan oleh seorang warga:

“setelah izin ditambang keluar, gejala masyarakat meningkat disebabkan karena tidak banyak melibatkan masyarakat. Maksud dari pemerintah saya yakin bagus karena bagian dari upaya meningkatkan ekonomi masyarakat. Namun, kemarahan tidak mungkin dihindari akibat mereka tidak dilibatkan dalam prosesnya sehingga ketegangan antara masyarakat dan pemerintah desa tidak bisa dihindari. Beberapa kali rapat dilakukan di Balai Desa dan itu rawan terjadi kemarahan kepada perangkat desa. Bahkan pernah Balai Desa diboikot dan dibekukan sebagai bentuk kemarahan masyarakat”.

Ketegangan yang terjadi antara masyarakat dengan perangkat desa menyebabkan balai desa di bekukan selama tiga bulan dan perangkat desa mengundurkan diri. Pembekuan Balai Desa mengakibatkan disfungsi pemerintahan desa dan praktis fungsi-fungsi pemerintahan tidak berjalan sama sekali. Seperti yang diungkapkan oleh warga:

“penyegekan kantor desa dan pengunduran diri perangkat Desa Paseban, Kencong sudah berjalan lebih dari tiga bulan. meskipun demikian masih belum ada langkah konkrit terhadap kondisi pemerintah desa. Bahkan Kepala Desa Paseban masih berkantor dikecamatan setempat. Hal ini ternyata menimbulkan dampak terhadap kelangsungan warga Paseban dalam mengurus administrasi desa”.

Keadaan ini sejalan dengan konsep Smelser sebagai bagian penting dari faktor terjadinya tindakan kolektif yaitu *structural strain* (ketegangan struktural)⁹. Ketegangan struktural muncul sebagai proses lanjutan dari kondisi struktural yang tidak mendukung. Seperti peneliti sebutkan

⁹ Neil J. Smelser, *Theory of Collective Behavior*, New York: The Free Press, 1962, hal., 15-17.

sebelumnya, kondisi struktural (*structural condusimnees*) yang tidak mendukung seperti pengambilan keputusan secara tiba-tiba tanpa partisipasi masyarakat memunculkan ketegangan struktural di mana antar masyarakat dengan pemegang kekuasaan berada dalam kondisi bertentangan. Ketegangan struktural bisa membuat masyarakat bergejolak dan melakukan berbagai macam aksi untuk menunjukkan kemarahan tersebut seperti penyegehan dan pemboikotan balai desa.

Pengorganisasian Gerakan

Pengorganisasian gerakan merupakan proses pembangunan gerakan mulai dari munculnya embrio gerakan sampai gerakan itu sendiri dilakukan. Pengorganisasian gerakan mencakup berbagai upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan ruang, waktu dan kondisi masyarakat untuk mencapai kesatuan visi sehingga gerakan tertata dengan baik, terkontrol, dan menjadi kekuatan besar. Berbagai respon masyarakat terhadap penambangan adalah situasi sosial yang membawa masyarakat kepada jurang perpecahan. Apalagi semakin menguatnya respon dan gejolak menolak penambangan menunjukkan agensi yang sangat kuat terhadap fungsi-fungsi struktural yang diakibatkan oleh tidak tertampungnya kehendak masyarakat sebagai bagian dari struktur masyarakat Desa Paseban.

Pada dasarnya, struktur adalah wadah yang menaungi anggota-anggotanya dalam mencapai kehidupan bersama yang lebih baik, dapat menjamin rasa aman, tentram dan dapat mempertahankan hidup dalam jangka waktu yang lebih lama. Alasan tersebut menjadi rasional bagi keberadaan struktur yang merupakan aturan dan sumber daya. Atau seperangkat relasi transformasi, terorganisasi sebagai kelengkapan-kelengkapan dari sistem-sistem sosial¹⁰. Terkait dengan gejolak penambangan, agensi para aktor tidak sejalan dengan keputusan yang diambil oleh perangkat desa sebagai pemimpin struktural merupakan *spatial* (ruang) terjadinya kegamangan agensi anggota struktural sehingga gejolak menolak penambangan merupakan pilihan agensi yang menguat sebagai bentuk kekecewaan terhadap keputusan penambangan. *Spatial* yang tersedia dikarenakan oleh pertama, manusia memiliki dualitas karakter yaitu bisa menjadi agen sekaligus

¹⁰ Anthony Giddens, *Teori Strukturalis*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hal., 40.

menjadi bagian struktur. Kedua, kebutuhan tidak tertampung oleh struktur. Antara kedua bagian ini memiliki keterkaitan erat. Agensi akan muncul ketika struktur tidak dapat memenuhi kebutuhan agen dan akan semakin menguat ketika struktur menunjukkan ketidakberdayaannya di hadapan agen. Meskipun struktur memiliki alat pemaksa seperti aparat keamanan, jika struktur tidak mampu menaungi kebutuhan agen maka terjadinya perlawanan adalah konsekuensi logis terhadapnya.

Pada kasus penolakan penambangan di Paseban, kekeliruan struktural dalam mengambil keputusan adalah titik sentral terjadinya gejolak agensi masyarakat. Agensi yang terjadi tidak dilakukan oleh beberapa orang, melainkan oleh sekelompok besar warga masyarakat Paseban. Agensi yang dilakukan sama yaitu menolak penambangan, meskipun agensi yang terjadi sama bukan berarti memiliki kesamaan dalam motivasi yang mendorongnya sehingga rawan terjadi perpecahan antar agen-agen penolak penambangan sehingga tujuan agensi terancam. Namun demikian, di sisi lain, kesamaan agensi bisa menjadi modal positif untuk menyamakan perjuangan menolak penambangan sehingga menjadi kekuatan besar. Kesamaan agensi merupakan peluang untuk membangun kekuatan agar motif-motif agen tertampung secara massif. Mengingat agensi yang dilakukan berseberangan langsung dengan pemerintah (Desa, Kecamatan dan Kabupaten) dan investor maka tidak dimungkinkan agensi tersebut terpecah-pecah karena lawan yang dihadapi adalah kekuatan besar. Pada titik ini, agen-agen menyadari bahwa kesatuan adalah solusi untuk menghadapinya, sehingga pengorganisasian gerakan diperlukan supaya agensi tidak terpecah.

PENUTUP

Sebelum isu penambangan bergulir, warga masyarakat Paseban yang mayoritas petani kecil dan buruh tani, terlibat dalam aktivitas kerja-kerja pertanian. Demikian pula, sebagian kecil warga yang berprofesi sebagai nelayan, setiap hari sibuk dengan kerja melaut untuk menangkap ikan. Hampir tidak ada warga yang menyadari dan memperbincangkan potensi pasir besi yang membentang di sepanjang pesisir Paseban. Baru ketika muncul isu penambangan oleh investor yang mendapatkan izin dari pemerintah kabupaten, dan informasi dari berbagai organisasi non-peme-

rintah, warga mulai menyadari dan mengetahui potensi kawasan pesisir Paseban. Berdasarkan informasi dan pengetahuan yang beragam yang diperoleh warga, maka warga pun memiliki bayangan tentang tambang yang tentu saja tidak tunggal. Bagi sebagian besar warga kecil yang memang hidup dalam kondisi miskin, dan pengetahuan yang mereka scrap, terutama dari pemerintah yang turut mensponsori penambangan, tambang di Paseban diimajinasikan sebagai peluang pekerjaan yang menjanjikan untuk perbaikan kehidupan ekonomi mereka. Sebaliknya, warga yang mendapat referensi pengetahuan dari kalangan aktivis *civil society*, mereka cenderung menolak tambang karena dinilai banyak *madharat*-nya dibandingkan *maslahah*-nya. Tidak sedikit pula dari warga yang cenderung pasif dan menilai penambangan sebagai urusannya orang-orang besar, pejabat pemerintah dan pengusaha.

Pilihan untuk menolak tambang, bukanlah pilihan semua warga masyarakat Paseban. Sebagian dari warga ada yang cenderung mendukung tambang, dan sebagian lainnya memilih diam. Hanya saja, dalam perkembangannya, warga yang memilih opsi untuk menolak tambang jumlahnya semakin besar (baca: mayoritas) dibandingkan dengan warga yang pasif dan mendukung tambang. Keterlibatan elemen-elemen *civil society* yang tentu saja beragam dan keberpihakan elit pemerintah desa, kian memperkuat posisi warga yang anti tambang. Pilihan sebagian besar warga untuk menolak tambang dimotivasi oleh beragam motif dan kepentingan, mulai dari moral (penambangan yang merupakan bagian dari industrialisasi dapat menciptakan dampak serius bagi tatanan moral masyarakat desa), ekologi (penambangan akan merusak lingkungan dan sekaligus melahirkan aneka bencana yang merugikan warga), dan tentu saja ekonomi (penambangan dinilai tidak partisipatif dan karenanya hanya menguntungkan segelintir elit ekonomi dan politik; investor dan pejabat pemerintah).

Demonstrasi yang disertai dengan perusakan simbol-simbol tambang seperti posko investor, elit warga yang pro-investor, dan alat-alat penambangan merupakan bentuk dari gerakan radikal dalam menolak tambang. Gerakan ini dipilih sebagai alat negosiasi khas orang kecil agar tuntutan mereka ataupun agenda perjuangannya berhasil. Berbeda dari kalangan elit ataupun kelas menengah terdidik, yang biasanya memilih opsi diplomasi dan

Gerakan Kontra Tambang Pasir Besi di Desa Paseban Jember

negosiasi, gerakan populer yang basisnya adalah masyarakat kecil, cenderung memilih gerakan massa yang bersifat radikal. Terbukti, melalui model gerakan semacam ini, gerakan sosial menolak tambang, untuk sementara waktu, berhasil memaksa investor untuk menghentikan proyeknya dan juga pemerintah kabupaten untuk meninjau ulang kebijakan eksplorasi penambangan yang menurut kritik warga, tidak pro rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adas, Michael. 1988. *Ratu Adil: Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa*, (terj. M. Tohir Effendi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. 2007. *Paradigma, Epistemologi dan Metode Ilmu Sosial-Budaya, Sebuah Pemetaan*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjahmada.
- Anderson, Perry. 1976. *The Antinomies of Antonio Gramsci*, dalam New Left Review 100.
- Bates, R.H. 1981. *Markets and States in Tropical Africa: The Political Basis*. Barkeley: University of Agricultural Policies.
- Fakih, Mansour. 2002. *Jalan Lain, Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Insist dan Pustaka Pelajar.
- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from The Prison Notebook*, editor dan terjemahan Quinten Hoare dan Geoffrey Nowell Smith, London: Lawrence and wishart.
- Hadiz, Vedi R. 2005. *Dinamika Kekuasaan Ekonomi Politik Indonesia Pasca Soeharto*, Jakarta: LP3ES.
- Hery Santoso. 2004. *Perlawanan di Simpang Jalan, Kontes Harian di Desa-deso Sekitar Hutan*, Yogyakarta: Damar.
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Protes Movement in Rural Java*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Kuntowijoyo. 2002. *Radikalisasi Petan*. Yogyakarta: Bentang.
- Maliki, Zaenuddin. 2004. *Agama priyayi, Makna Agama di Tangan Elit Penguasa*. Yogyakarta: Pustaka Marwa.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Popkin, S.L. 1979. *The Rational Peasant: The Political Economy of Rural Society in Vietnam*. Barkeley: University of California Press.
- Ritzer, George. 2009. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2005. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media.

- Singh, Rajendra. 2001. *Social Movement, Old and New: A Post Modernist Critique*. New Delhi, Thousand Oaks, London: Sage Publications.
- Susriawan, 1999. Harmoni, Stabilitas Politik dan Kritik Sosial, dalam Moh. Mahfudz dkk. (ed.) *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*. Yogyakarta: UII Press.
- Scott, James C. 1976. *The Moral Economy of Peasant*. New Haven: Yale University Press.
- Smelser, Neil J. 1962. *Theory of Collective Behavior*. New York: The Free Press.
- Taylor, Steven J. dan Robert Bogdan. 1984. *Introduction to Qualitative Research Methods: The Search for Meanings*. New York, Singapore: John Wiley & Sons.
- Water, Malcom. 1994. *Modern Sociology Theory*. London: Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication.
- Wolf, E.J. 1969. *Peasant Wars of Twentieth Century*. New York: Harper & Rowy.
- Zuhro, Siti. 2012. Negara, Demokrasi, dan *Civil Society*, dalam Luthfi J. Kurniawan dan Hesti Puspitosari, *Negara, Civil Society dan Demokratisasi*. Malang: Intrans Publising.

Khusna Amal